

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah merupakan momen penggunaan hak konstitusional warga dalam berdemokrasi. M. Fachri Adnan (2012:12) menegaskan, partisipasi warga dalam menentukan kepala daerah secara langsung merupakan perubahan politik yang prinsipil dalam upaya perluasan implementasi demokrasi di Indonesia sejak tahun 2005. Dimana sebelumnya, pada zaman Orde Baru, rakyat hanya sebagai objek politik belaka, sekarang rakyat menjadi subjek penentu siapa yang akan menjadi kepala daerah.

Kepemilihan rakyat secara langsung pada pemilihan kepala daerah merupakan amanat pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 56 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Demokratis bisa dimaknai demokrasi secara langsung, demokrasi secara perwakilan, atau bahkan secara progresif dapat diartikan disetujui oleh seluruh rakyat secara aklamasi, pun juga cara yang tidak kurang nilai demokratisnya.<sup>1</sup> Negara Indonesia memutuskan pemilihan demokrasi secara langsung untuk pemilihan kepala daerah sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

---

<sup>1</sup> Suladri, *Pilkada dan Makna Demokratis*, republika.co.id, 31 Oktober 2016

Peraturan di atas jelas telah memberikan hak politik kepada rakyat untuk memilih gubernur dan bupati/walikota. Seiring dengan itu, hak politik masyarakat terbuka lebar untuk melakukan partisipasi politik secara konvensional. Kendati demikian, fakta dari pemilu ke pemilu, banyak warga yang tidak menggunakan hak politik tersebut. Kajian terbaru tentang *non voter* dilakukan Saiful Mujani (2007). Saiful menemukan fakta bahwa semakin tinggi pendidikan orang, makin tidak berminat mereka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka adalah pemilih rasional dan terdidik, tetapi apatis dan skeptis dengan pemilihan umum. Namun Saiful tidak menguraikan alasan apatisisme dan skeptisisme para *non voter* dari kalangan terdidik. Sementara pendalaman penjelasan alasan ketidakmemilihan kalangan melek politik jelas sangat penting dalam keilmuan perilaku pemilih.

Kajian yang sama juga dilakukan Bismar Arianto, dimuat dalam Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan tahun 2011. Bismar mengutip pendapat Arbi Sanit dan mengemukakan bahwa orang yang tidak memilih disebut dengan golongan putih (golput). Golput muncul sebagai gerakan protes politik karena mereka kecewa terhadap penanganan perkara kebangsaan. Mereka menyampaikan protes itu saat penyelenggaraan pemilu. Bismar juga tidak menjelaskan perkara kebangsaan apa saja yang memicu pemilih jadi golput.

Pada sisi lain, Budiarto (1996:185) menyatakan dalam negara-negara demokratis umumnya menganggap lebih banyak partisipasi masyarakat, makin lebih baik kualitas demokrasi. Partisipasi masyarakat merupakan implementasi nilai demokrasi dan memiliki peran penting dalam kehidupan politik. Karena dalam negara demokrasi semua bersumber pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Bahkan Verba dan Nie, (1972) menyebut partisipasi politik sebagai *cornerstone* dan jantung demokrasi. Pendapat tersebut disokong oleh Helander (2012), bahwa partisipasi politik adalah prasyarat utama dalam sebuah negara demokrasi.<sup>2</sup> Penulis melihat, di sinilah titik masalah bahwa kualitas kehidupan berdemokrasi ditentukan oleh tingkat penggunaan hak memilih oleh warga negara. Namun dari pemilihan kepala daerah setiap periode di Kabupaten Sijunjung, warga yang tidak menggunakan hak pilihnya terus meningkat. Lebih menarik lagi, sebagaimana hasil penelitian Mujani sebagian yang tidak memilih itu adalah kalangan melek politik. Timbul pertanyaan, apa penyebab orang melek politik tidak menggunakan hak pilihnya.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis akan meneliti alasan-alasan orang melek politik yang tidak memilih tersebut. Penelitian yang dilakukan ini tidak dalam posisi menegasikan apa yang telah dihasilkan oleh penelitian-penelitian di atas, tetapi akan melanjutkan kajian yang masih menyisakan ruang penelitian. Menurut hemat penulis ada ceruk yang belum terjelaskan oleh kajian sebelumnya, terutama soal pendalaman penjelasan kenapa orang melek politik cenderung tidak memilih. Selain itu, kajian *non voter* di Kabupaten Sijunjung belum pernah dilakukan dan ditambah lagi animo pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sangat rendah. Animo memilih warga Kabupaten Sijunjung jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Dhamasraya yang notebene sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sijunjung.

---

<sup>2</sup> Najmuddin Mohammad Rasul, Penggunaan Media, Norma Kewarganegaraan Dan Partisipasi Politik Dalam Era Transisi Ke Demokrasi Di Indonesia, Volume 31 No 1, Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication 2015, hal. 193.

## 1.2. Rumusan Masalah

Di Indonesia, gerakan golongan *non voter* atau lazimnya disebut golongan putih (golput) dipelopori oleh Arif Budiman pada era tujuh puluhan. Golput, menurut Sri Yanuarti (2009:22), timbul akibat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 1971. Pemilu 1971 dalam pandangan aktivis kampus kala itu hanya merupakan ajang penipuan sistematis terhadap rakyat. Makanya, mereka melakukan *counter culture* untuk menggugat sistem politik yang ada. Mereka terinspirasi dari gerakan *counter culture* yang marak di negara Barat di era 60-an yang merupakan gerakan pembalikan budaya yang dilakukan oleh akar rumput sebagai simbol anti kemapanan yang dimanifestasikan dalam gaya hidup *hippies* anti perang dan cinta damai.

Sebagai bentuk perlawanan dari kalangan aktivis kampus, gerakan golput pun didominasi oleh cendekiawan muda. Protes pertama mereka adalah mengumandangkan ide tidak ikut pemilu. Semula gerakan ini hanya magnet bagi komunitas kampus, namun lambat laun melebar dan akhirnya bisa diterima khususnya oleh masyarakat melek politik. Bermula dari pertemuan di Balai Budaya 3 Juni 1971, Arif Budiman yang kala itu cukup populer di kalangan aktivis mulai membuka wacana tentang perlunya gerakan tandingan untuk meminimalkan superioritas pemerintah. Satu di antaranya, tidak ikut pemilu, bukannya menolak pemilu.

Ide golput muncul untuk mengingatkan lemahnya kehidupan perpolitikan nasional. Negara dianggap tidak berhasil mengajak rakyat dalam menyukseskan program pemilu. Meski begitu, ide tersebut tidak serta merta diterima. Suara mahasiswa terpecah. Sebagian mendukung dan sebagian lagi menentang. Aktivis sekaliber Dr Sjahrir, H J C Princen, Akbar Tanjung, Marsilam Simanjuntak dan Yusuf Kaffi

merupakan aktor pendukung golongan putih. Sementara Cosmas Batubara, Marrie Muhammad dan David Napitupulu menjadi pembela pemerintah dengan pemilunya.

Kendati demikian, fenomena golput terus menggelinding pasca reformasi 1998. Jumlah warga yang tidak memilih turun naik dari satu pemilihan ke pemilihan. Ada tren fluktuatif persentase partisipasi pemilih. Namun, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya cukup besar angkanya.

**Tabel 1**  
**Partisipasi dan Golput Pasca Reformasi di Indonesia**

No	Pemilu	DPT	Partisipasi	Golput	Keterangan
1	1999	117.815.053	93,30 Persen	7,3 Persen	Pileg
2	2004	148.000.369	84,07 Persen	15,9 Persen	Pileg
3	2004	153.320.544	78,2 Persen	21,8 Persen	Pilpres Putaran 1
4	2004	150.644.184	76,6 Persen	23,4 Persen	Pilpres Putaran 2
5	2009	171.265.441	70,9 Persen	29,1 Persen	Pileg
6	2009	176.367.056	71,7 Persen	28,3 Persen	Pilpres
7.	2014	185.464.985	75,11 Persen.	24,89 Persen	Pileg
8	2014	188.224.161	70 Persen	30 Persen	Pilpres

Sumber: KPU Republik Indonesia

Di Indonesia, sebagaimana hasil penelitian Sri Yanuarti (2009:21), perilaku *non voting* pada umumnya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Pertama orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. Kedua orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar. Ketiga orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari surat suara. Dalam konteks semacam ini perilaku *non voting* adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan.

Keempat orang yang tidak hadir di tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara. Fenomena terakhir ini banyak terjadi pada Pemilu 2009 yang disebabkan buruknya kinerja penyelenggara pemilu. Dalam konteks semacam ini perilaku *non voting* lebih disebabkan alasan administratif. Biasanya kelompok ini disebut golput pasif.

Kajian Sri Yanuarti tidak menjelaskan pemilih yang benar-benar tidak menggunakan hak pilih. Hasil penelitian ini memcampuradukan pemilih yang tidak memilih dengan pemilih yang memilih, namun suaranya tidak sah. Pemilih dengan suara yang tidak sah, jelas tidak mengurangi angka partisipasi. Akan tetapi golput yang tidak datang ke TPS, berdampak pada persentase partisipasi.

Oleh karena itu, penelitian Bismar Arianto (2011), lebih menjelaskan tentang golput yang tidak datang ke TPS. Menurut Bismar, yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya secara sederhana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yaitu faktor dari internal pemilih dan faktor eksternal. Faktor internal adalah alasan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan eksternal alasan tersebut datang dari luar dirinya.

Satu dari faktor eksternal itu adalah faktor politik. Faktor politik adalah alasan yang ditimbulkan oleh aspek politik yang menyebabkan masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia, stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan para politisi yang tidak mengakar yang lebih dekat dengan para petinggi partai dan pemegang kekuasaan.

Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada Kabupaten Sijunjung, jumlahnya terus bertambah dari satu pemilihan ke pemilihan. Angka golput pada Pilkada serentak 2015, sudah di atas angka 40 persen.

**Tabel 2**  
**Partisipasi dan Golput di Kabupaten Sijunjung**

No	Tahun Pilkada	Partisipasi		Golput
		Jumlah	%	
1	2005	114.375	70,95 Persen	29,05 Persen
2	2010	134.980	66,98 Persen	33,02 Persen
3	2015	147.946	58,93 Persen	41,07 Persen

Sumber: KPU Kabupaten Sijunjung

Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan KPU Kabupaten Sijunjung dengan Lembaga Kabisat tahun 2015, didapatkan hasil bahwa tingkat melek politik warga Kabupaten Sijunjung, hanya 65.25 persen. Dan dari jumlah yang melek itu hanya 10,69 persen orang datang ke Tempat Pemungutan Suara.

“Tingkat melek politik dengan partisipasi pemilih di Kabupaten Sijunjung berhubungan namun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan analisis korelasi product moment antara x dan y pada tabel di atas menghasilkan koefisien korelasi  $r_{yx} = 0.327$  berada pada interval koefisien 0.200-0.399 dengan tingkat hubungan rendah. Dari hasil korelasi tersebut, dapat diketahui sumbangan variable x terhadap variable y adalah  $KP = r^2 \times 100\% = 0.327 \times 0.327 \times 100\% = 10.69\%$ . Artinya, sumbangan 10.69% variable y dijelaskan oleh variable x, sisanya 89.31% dijelaskan oleh variable lain yang tidak dijelaskan dalam pembahasan ini” (Kabisat, *Hubungan Tingkat Melek Politik Warga dengan Partisipasi Pemilih pada pemilu/ pilukada di Kabupaten Sijunjung*, 2015:23).

Di sisi lain, ketika KPU Kabupaten Sijunjung mengadakan acara sosialisasi bertajuk Palanta Demokrasi Pilkada Sijunjung tahun 2015 selama 5 kali di kedai-kedai masyarakat nagari yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sijunjung, selalu muncul pertanyaan bernada pesimisme tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh warga. Mereka mengatakan, lebih ada hasil ekonomisnya berupa pendapatan kalau mereka pergi menyadap karet ketimbang datang ke TPS. Menyadap karet jelas mendatangkan rupiah walau harganya murah, sementara datang ke TPS hanya buang-buang waktu dan tidak dapat apa-apa. Yang bersuara lantang seperti itu adalah tokoh masyarakat, mahasiswa dan perangkat nagari.

Beririsan dengan itu, Saiful Mujani (2007) sebagaimana dikutip Nyarwi dalam penelitian Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif yang diterbitkan jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Volume 12 Nomor 3 Tahun 2009, menemukan kebanyakan *non voter* itu adalah orang terdidik. Semakin tinggi tingkat pendidikan warga cenderung absen dalam Pemilu. Berbeda dengan warga Amerika, dimana kian terdidik mereka, kian partisipatif dalam pembangunan kehidupan demokrasi.

Pada sisi lain, Lipset (1963) yang dirujuk oleh Bayu Pramutoko dalam tulisan Demokrasi dan Demokratisasi yang dimuat dalam media Forum Kajian Ilmu (akses 1 Desember 2016), transisi menuju demokrasi pada suatu negara, terjadi apabila adanya pertumbuhan ekonomi dan penambahan masyarakat terdidik. Ia beralasan, dengan masyarakat yang telah sejahtera secara ekonomi dan semakin tingginya tingkatan pendidikan semakin terbuka mekanisme pengambilan keputusan untuk urusan-urusan



publik, dan semakin terbukanya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan keputusan yang penting, yang menyangkut kepentingan publik.

Dapat diartikan, orang terdidik menjadi katalisator transisi menuju demokrasi. Demokrasi atau proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak, yaitu keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Sehingga langsung atau tidak langsung dalam mengembangkan keputusan, memantau proses pelaksanaan keputusan publik dan melakukan advokasi terhadap akses pelaksanaan kebijakan di lapangan.<sup>3</sup>

Sejalan dengan pandangan di atas, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (antarantb.com; 2014), guna menghasilkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat dibutuhkan upaya meningkatkan jumlah pemilih cerdas.

Alih-alih berharap banyak pada kontribusi orang melek politik dalam pematangan demokrasi, mereka yang paham politik ini justru tidak menggunakan suaranya pada pemilu. Mereka tidak beranimo dan tidak tertarik dengan Pilkada. Mereka tidak berminat menyalurkan hak konstitusi ke TPS.

Ironisnya lagi, menurut Syofyan Basir (detik.com:2012), Indonesia saat ini disebut-sebut satu di antara kampiun negara demokrasi terbesar dunia, bersama India dan Amerika Serikat. Kenapa bisa bangsa ini mencapai predikat itu? Bukankah satu komponen pengokohan demokrasi yang matang itu adalah peranan orang terdidik. Kenapa ketika orang terdidik tidak ikut memilih, proses demokratisasi tetap jalan. Dalam hal ini, penulis ingin fokus pada pendalaman alasan orang terdidik tidak berminat menggunakan hak suaranya pada Pilkada Kabupaten Sijunjung Tahun 2015.

---

<sup>3</sup> Amich Alhumami, *Gus Dur, Demokrasi, dan Masa Depan Politik Islam*, <http://perpustakaan.bappenas.go.id>, 31 Oktober 2016

Dari penjelasan di atas, penulis berasumsi bahwa *non voter* pada Pilkada Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 selain yang dipaparkan para ahli, juga terbagi menjadi non voter moralis dan kompetensi. Penulis menduga, jangan-jangan kalangan terdidik tidak menggunakan hak pilih mereka tersebut karena moralitas pasangan calon. Perkara moral yang melekat pasangan calon menjadi pertimbangan pemilih meleak politik untuk absen datang ke TPS.

Selanjutnya, penulis berasumsi bahwa kemampuan pasangan calon juga jangan-jangan menjadi penyebab malasnya pemilih paham politik untuk menunaikan hak konstitusional. Rendahnya kompetensi pasangan calon menjadi alasan bagi pemilih untuk menjadi golput. Mereka menjadi kalangan yang tidak tertarik datang ke tempat pencoblosan. Bisa jadi mereka berpikir bahwa siapapun pasangan calon yang terpilih tidak bakal membawa perubahan kearah kemajuan lantaran tidak ada pasangan calon yang memiliki kemampuan yang memadai.

Penulis ingin membuktikan dua asumsi di atas. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada pembuktian golput terdidik. Apakah benar golput terdidik itu terbagi lagi menjadi golput moralis dan kompetensi?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan orang melek politik tidak ikut memilih pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Sijunjung. Apakah pemilih terdidik di Kabupaten Sijunjung mengalfakan hak suaranya benar karena faktor moralis dan kompetensi pasangan calon?

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah penjelasan baru dan tambahan tentang perilaku *non voter* dari perspektif pemilih dalam melihat kualitas kompetensi dan integritas kandidat kepala daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan perilaku *non voter* terdidik sekaitan dengan pemilihan langsung kepala daerah.
3. Penelitian ini diharapkan bisa jadi rujukan bagi penyelenggara pemilu dalam merumuskan metode sosialisasi dan pendidikan politik pemilih terutama bagi *non voter* melek politik.

## የግንባታ ስልጠና

